



## **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 745 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Menimbang : a.** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4  
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  
Tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu penetapan  
klasifikasi Informasi di Lingkungan Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah  
Provinsi DKI Jakarta;

**b.** Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas  
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan  
Menengah Provinsi DKI Jakarta tentang Klasifikasi  
Informasi di Lingkungan Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah  
Provinsi DKI Jakarta.

**Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang  
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3502);

**2.** Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang  
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4744);

**3.** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha  
Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA.**

**KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari:

1. Daftar Informasi Publik (DIP);
2. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
3. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan.

**KEDUA** : Klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 27 Juli 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,

  
ELISABETH RATU RANTE ALLO  
NIP 197009241998032004

Tembusan:

1. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Bidang/Suku Dinas/UPJ di Lingkungan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,  
Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 745 Tahun 2023  
Tanggal : 27 Juli 2023

**A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIMUMUKAN SECARA BERKALA**

| NO. | KELOMPOK INFORMASI   | RINCIAN INFORMASI  |
|-----|--|--|
| 1.  | Profil   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>b. Struktur Organisasi</li> <li>c. Daftar Pejabat Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>d. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)</li> </ul>                          |
| 2.  | Ringkasan Program dan Kegiatan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ringkasan DPA DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta</li> <li>b. Penanggung Jawab Program</li> <li>c. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan</li> <li>d. Indikator RKKPD dan RPJMD</li> <li>e. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>   |
| 3.  | Rincian Kinerja  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta</li> <li>b. Rencana Strategis (Renstra) DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta</li> <li>c. Rencana Kerja (Renja)</li> <li>d. Indikator Kinerja Utama</li> <li>e. Perjanjian Kinerja</li> </ul>   |
| 4.  | Laporan Keuangan   | Laporan Keuangan yang telah diaudit  |
| 5.  | Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diterima</li> <li>b. Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik</li> <li>c. Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memeroleh Informasi Publik</li> <li>d. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti (Dikabulkan dan ditolak)</li> </ul> |
| 6.  | Hak dan Tata Cara dalam Memeroleh Informasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan, serta Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Informasi tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta  |
| 7.  | Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tata Cara Penanganan Pengaduan dari Masyarakat</li> <li>b. Tindak Lanjut terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat</li> </ul>  |
| 8.  | Laporan Jakarta Entrepreneur   | Laporan Data Mingguan Jakarta Entrepreneur   |

B. INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

| NO. | KELOMPOK INFORMASI            | RINCIAN INFORMASI   |
|-----|-------------------------------|---|
| 1.  | Daftar Informasi Publik (DIP) | Informasi Publik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta yang Disediakan Melalui Website Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta  |
| 2.  | Peraturan dan Keputusan       | Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkup Tugas DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta   |
| 3.  | Kepegawaian                   | a. Data Statistik Pegawai DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta<br>b. Rekapitulasi Data Pegawai DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta   |
| 4.  | Identitas Pembuat Aduan       | a. Data Statistik Aduan Terhadap Layanan Publik di DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta<br>b. Rekapitulasi Data Pembuat Aduan Terhadap Layanan Publik di DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta |
| 5.  | Jumlah Pengunjung Website     | Rekapitulasi Data Jumlah Pengunjung Website PPIID Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta   |

C. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

| NO. | KELOMPOK INFORMASI   | ALASAN DIKECUALIKAN   |
|-----|--|---|
| 1.  | Data Pribadi Wajib Retribusi   | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 2.  | Data Pribadi Pegawai Dinas PPKUKM  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 3.  | Data Rincian Kontrak Pegawai Dinas PPKUKM  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 4.  | Berita Acara dan Penjatuhan Hukuman Disiplin   | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 5.  | SK Kepegawaian   | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 6.  | Kartu Identitas Istri/ Suami Sáh dari Aparatur Sipil Negara, dan Kartu Identitas Pegawai | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 7.  | Data Keluarga Pegawai  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 8.  | Data Industri dan Data Kawasan Industri  | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 9.  | Data Penilaian Hasil Kurasi  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 10. | Data Pribadi Seseorang/ Badan Usaha Pelaku Usaha Ekspor Teregistrasi e-SKA               | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 11. | Data Pribadi Seseorang/ Badan Usaha Pelaku Usaha Sektor Perdagangan Terdaftar OSS  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          |
| 12. | Laporan Keuangan Koperasi  | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          |
| 13. | Laporan Rapat Anggota Tahunan  | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          |
| 14. | Data Pribadi Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi   | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          |
| 15. | Data Pribadi Anggota Koperasi  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          |
| 16. | Simpanan Pribadi Anggota Koperasi  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          |
| 17. | Dokumen Notulen/ Nota Dinas Hasil Rapat Internal Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Termasuk Lampiran/ Bukti Dukung (Daftar Hadir, Foto, dan Lainnya) | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          |
| 18. | Naskah Dinas dan Kelengkapan Pendukung Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta   | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          |
| 19. | Data Pribadi Peserta Jakarta Entrepreneur  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          |
| 20. | Data Pribadi Pedagang Kaki Lima  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          |
| 21. | Berita Acara Pengawasan (BAP) Beserta Lampiran   | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik    |
| 22. | Surat Peringatan/ Teguran  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          |
| 23. | Berita Acara Pemasangan Garis Pengamanan Barang  | Pasal 17 huruf a, b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 24. | Berita Acara Pembuka Garis Pengamanan Barang   | Pasal 17 huruf a, b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 25. | Berita Acara Klarifikasi   | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik    |
| 26. | Data Laporan Hasil Pengujian Produk Bahan dan Barang Teknik  | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          |
| 27. | Rincian Data Identitas Pemohon/ Pendaftar Pengujian Produk Bahan dan Barang Teknik (Wajib Retribusi)   | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          |
| 28. | Rincian/ Dokumentasi Pemrograman Sistem Informasi Pengujian Produk Bahan dan Barang Teknik   | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 29. | Data Laporan Hasil Pengujian Produk Kerajinan dan Tekstil  | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 30. | Data Laporan Hasil Pengujian Alat UTPP   | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 31. | Data Pribadi Penyewa atau Pengontrak yang Ditangani oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil, dan Menengah serta Perbukitan Pulogadung (Sarana Kerja Hunian, Barak Kerja, Lahan, Ruang Pamer dan Gudang)                                   | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 32. | Data atau Informasi Terkait Kepemilikan Aset Tanah yang Dikelola oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil, dan Menengah Serta Perbukitan Pulogadung (baik berupa Sertifikat Hak Pengelolaan, Sertifikat Hak Pakai dan Surat Pelepasan Hak) | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 33. | Dokumen yang Berkaitan dengan Keuangan   | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 34. | Data Pribadi Calon Peserta Pelatihan   | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 35. | Data Pribadi Peserta Pelatihan   | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 36. | Data Pribadi Narasumber Pelatihan  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 37. | Data Informasi Detail Server (Spec) dan Lokasi Server  | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



*Elisabeth Rante Allo*

ELISABETH RATU RANTE ALLO  
NIP 197009241998032004